

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alatas, Sayed Hussein, 1999, *Corruption and The Destiny of Asia*, Simon & amp; Schuster, Malaysia
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendie, H., 2017, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Makawimbang, Harold Ferry, 2016, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU No. 2001*, CV. Maudar Maju Bandung, Bandung.
- Ravena, Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, PT Balebad Dedikasi Prima, Jakarta.
- Sandri, Bobbi, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Santoso, Sam, 2003, *Seni Korupsi Di Perusahaan The Art Of Corruption*, Jawa Pos Press, Surabaya.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas - Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soesilo, R., 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Cetakan Kelima*, Politeia, Bogor.

Julius Pieter Tobi William, 2022

OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id– www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id]

- Sujono, 2020, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Genta Publishing, Jakarta.
- Sukiyat, H., 2020, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Waluyo, Bambang 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DESERTASI

- Fatimah, Siti, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, Vol. 13 No. 1, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>
- Hermanto, Asep Bambang, 2016, *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*, Selisik, Vol. 2 No. 4, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Institute For Social Transformation, 2002, *Korupsi: Sengketa antara Negara dan Modal*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 14, tahun III.
- Maryati, 2014, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum dan Beberapa Pemikiran dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum yang Berkeadilan, Inovatif*, Vol. 8 No. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2061>
- Nazikha, Frelyka Indana Ainun, 2018, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14> .
- Robertson, 2021, *Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi Universitas Sumatera Utara.
- S, Kusnu Goesniadhie, 2010, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/6%20Kusnu%20Goesniadhie%20S.pdf>
- Sandri, Bobbi, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suyatmiko, Wawan Heru, 2021, *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- [Taqwarahmah, Citra Gaffara, 2014, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan \(Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013\)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.](#)

Julius Pieter Tobi William, 2022

OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id– www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id]

SUMBER LAINNYA

A. TERBITAN LEMBAGA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar*, Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012), Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, *Laporan Hasil Penyelarasan Akhir Naskah Akademik Rancangan undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, *Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020*.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2011, *Kajian Uang Pengganti*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2019, *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018*.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2020, *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2021, *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2021, *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021*.

B. WEBSITE/INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.13 WIB.
- <https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 17.12 WIB.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/23/divonis-bui-12-tahun-juliari-batubara-juga-wajib-ganti-rp-145-miliar-dan-dicabut-hak-politiknya>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 23.43 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-ada-korupsi-di-belakang-lt5aa6a72df062c?page=all>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 14.30 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/09002551/hitung-sendiri-kerugian-negara-dalam-kasus-rj-lino-pimpinan-kpk-bpk-lama?page=all>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 14.21 WIB.
- <https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-kpk-terkait-kasus-suap-nurhadi-menantunya-gniz>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 20.43 WIB.

Julius Pieter Tobi William, 2022

OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id– www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id]

C. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Julius Pieter Tobi William, 2022

***OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id– www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id]